Ringkasan Eksekutif

oleh

Slamet Widodo, S.E., M.E. *) Martha Carolina, SE., Ak., M. Ak.*) Anisa Fitria Wulaningtyas, S.E. *)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP Tahun 2017 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPP tahun 2017 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 80 LKKL atau 90,90 persen diantaranya memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 6 LKKL atau 6,81 persen dan opini tidak memberikan pendapat 2 LKKL atau 2,28 persen. Opini WDP atas 6 LKKL dan opini TMP atas 2 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2017 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2017.

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI